

## **BAB 1**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Setiap negara selalu menginginkan agar pembangunan di negaranya berjalan dengan baik, efektif, dan merata. Ketika pembangunan di sebuah negara dapat berjalan dengan baik, maka negara tersebut akan memiliki progress yang cukup baik sehingga mampu menjadikan negara tersebut sebagai sebuah negara yang bersaing. Untuk dapat melaksanakan sebuah pembangunan di negara dengan baik, negara membutuhkan faktor pendukung dan penunjang dalam mendorong pembangunan itu sendiri, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal<sup>1</sup>. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai faktor internal yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan itu sendiri, ada faktor eksternal yang tidak kalah penting untuk mendukung proses pembangunan tersebut.

Faktor eksternal yang dimaksud disini adalah bantuan asing atau bantuan negara lain dalam hal ini adalah negara maju sebagai pendonor, untuk memberikan sejumlah bantuan kepada penerima donor dalam hal ini adalah negara berkembang dengan berbagai jenis, baik berupa modal maupun non modal. Seperti bantuan teknis, pemberian tenaga terampil, dan lain-lain. Bantuan luar negeri dapat diasumsikan sebagai penunjang untuk mempermudah dan mempercepat proses pembangunan, karena bantuan luar negeri dapat secara seketika meningkatkan persediaan tabungan domestik sebagai hasil dari meningkatnya laju pertumbuhan yang ingin dicapai<sup>2</sup>.

Bantuan luar negeri ini sudah cukup fenomenal pasca Perang Dunia kedua. Terutama di masa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Saat itu kedua negara adikuasa

---

<sup>1</sup> "Investasi Pembangunan USAID di Indonesia", <http://www.usaid.gov>, 6 Juni 2014

<sup>2</sup> "Hibah luar negeri, APBN, dan Grant Trap", <http://www.bappenas.go.id>, 20 September 2014

berlomba-lomba untuk memperbanyak sekutu dan menyebarkan ideologi mereka ke negara-negara lain, dengan cara memberikan bantuan asing kepada negara-negara tujuan ekspansi mereka. Fenomena ini terjadi hingga sekarang, karena seperti yang kita ketahui setiap negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negaranya. Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang turut melaksanakan pembangunan membutuhkan bantuan asing ini untuk menunjang proses rencana pembangunan tersebut. Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang telah lama menjadi negara pendonor bantuan asing kepada negara dunia ketiga, salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat memiliki sebuah badan kerjasama pembangunan yang secara spesifik menangani berbagai macam kerjasama dalam program pemberian bantuan kepada negara-negara dunia ketiga. Organisasi ini diberi nama United States Agency for International Development (USAID) atau dalam bahasa Indonesia yakni Badan Bantuan Pengembangan Internasional Amerika Serikat.

USAID merupakan sebuah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang bersifat Independen, dan diresmikan oleh John.F Kennedy sebagai bagian dari Undang-Undang yang membahas Bantuan Luar Negeri tahun 1961<sup>3</sup>. Misinya yaitu mengelola bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi negara-negara asing termasuk Indonesia. USAID telah banyak memberi kontribusi kepada Indonesia di berbagai sektor, seperti di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, HAM, pengenalan demokrasi hingga tata pemerintahan yang baik (good governance). USAID juga mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan mengelola kemampuan dan sumber daya yang ada di tingkat lokal<sup>4</sup>. USAID mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan mencegah timbulnya berbagai masalah sebagai akibat dari penebangan hutan, polusi udara, pemanasan global, polusi air tanah, serta pembuangan limbah ke laut. Program USAID untuk Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah mendukung pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan mengembangkan kehidupan demokrasi.

---

<sup>3</sup> "USAID milik Amerika Serikat", ditpolkom.bappenas.go.id, 3 Juli 2014

<sup>4</sup> *Ibid*

Dalam beberapa tahun terakhir ini, USAID telah terlibat dalam mengupayakan berbagai perbaikan akibat krisis ekonomi dan politik di Indonesia. Program yang dijalankannya menekankan kepada perbaikan ekonomi dan sistem finansial, perluasan lapangan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta jaminan pangan untuk kelompok masyarakat tertentu.

USAID dan Indonesia telah bekerja sama sejak tahun 1950, Amerika melalui USAID telah memberikan dana bantuan kepada Indonesia sebesar US\$ 80 juta untuk bidang umum dan US\$ 67 juta untuk membantu perbaikan akibat perang di Indonesia<sup>5</sup>. Program utama USAID yang utama terdiri dari empat program, pertama tata kelola pemerintahan yang demokratis diperkuat. Kedua, pelayanan dasar umum untuk kelompok paling miskin dan rentan meningkat. Ketiga, prioritas pembangunan global yang menjadi kepentingan bersama meningkat. Keempat, kerjasama ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi meningkat<sup>6</sup>.

Jika kita melihat dari jumlah dan bentuk bantuan yang diberikan USAID kepada Indonesia tentunya banyak sekali kontribusi Amerika Serikat dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Akan tetapi bantuan asing yang telah diberikan oleh USAID kepada Indonesia diikuti oleh motif yang dimiliki Amerika Serikat itu sendiri. Amerika Serikat memiliki motif kepentingan nasional baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dalam pemberian bantuan asing melalui USAID tersebut.

Jika dianalisa dengan baik kita akan menemukan bukti ekspansi asing yang kuat mendominasi kebijakan-kebijakan baik di sektor ekonomi maupun politik, yang ada di Indonesia. Ekspansi asing dalam memonopoli pembangunan di Indonesia ini dilakukan dengan berbagai cara. Baik dengan memberikan bantuan internasional, ataupun dengan cara lain seperti memberikan pinjaman kepada negara ini yang diikuti dengan syarat-syarat yang

---

<sup>5</sup> "USAID milik Amerika Serikat", ditpolkom.bappenas.go.id, 3 Juli 2014

<sup>6</sup> "Investasi Pembangunan USAID di Indonesia", <http://www.usaid.gov>, 6 Juni 2014

harus dilakukan oleh pihak peminjam seperti yang pernah terjadi di masa orde baru. Dominasi ekspansi asing begitu terlihat dengan fenomena kebijakan pemerintah yang saat itu berlaku dengan mengutamakan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat. Kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia cenderung menguntungkan pihak asing dibanding negara kita sendiri, bahkan ditemukannya beberapa kebijakan ekonomi yang dibuat cenderung bersifat neoliberal. Dimana jika berbicara mengenai, Neoliberal sudah pasti akan menghambat pembangunan perekonomian negara ini. Neoliberal selalu berupaya mengupayakan bagaimana memindahkan aset ekonomi negara menjadi kepemilikan pribadi atau swasta. Pihak asing kerap kali beralih sistem ini dilakukan agar supaya pemerintahan berjalan efisien sekaligus memperbaiki indikator perbaikan ekonomi negara.

Penelitian ini tidak akan membicarakan neoliberal terlalu mendalam, namun disini penulis akan memberikan contoh garis besar dari kebijakan neoliberal yang meliputi, disiplin kebijakan fiskal, arah penggunaan dana publik dari subsidi, reformasi pajak, tingkat bunga bank, nilai tukar uang, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi asing, privatisasi perusahaan negara, deregulasi, keamanan legal atas hak kepemilikan. Contoh diatas merupakan poin besar dari kebijakan yang bersifat neoliberal. Namun inti kebijakan ekonomi pasar Neoliberal ini dapat disarikan menjadi tiga bagian besar. Pertama, tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar, Kedua kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui, dan ketiga, pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penertiban undang-undang<sup>7</sup>.

Kebijakan ekonomi yang cenderung bersifat neoliberal, akan menghambat pembangunan perekonomian dalam suatu negara. Karena neoliberal cenderung menguntungkan pihak-pihak asing. Bantuan internasional yang mereka berikan kepada

---

<sup>7</sup> "Memahami Neoliberalisme", [www.academia.edu](http://www.academia.edu), 21 September 2014

negara berkembang, sebenarnya merupakan sebuah umpan untuk terjat dalam dominasi mereka untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi bagi negara penerima bantuan tersebut.

Amerika Serikat sebagai sebuah negara superpower dan agen yang bertindak dalam meluaskan ekspansi asingnya dengan kebijakan ekonomi maupun non ekonomi demi meraup keuntungan dari negara ketiga, yang diprakarsai oleh organisasi Internasional yang dibuatnya, terutama IMF dan World Bank. Setelah Indonesia mulai terjat masuk ke dalam perjanjian yang dibuat oleh organisasi tersebut., hal ini diteruskan dan diawasi oleh badan asing yang sama yaitu USAID. USAID sebagai lembaga yang dinaungi oleh Amerika Serikat bertindak sebagai project manager yang mempengaruhi beberapa kebijakan ekonomi di Indonesia.

Salah satu contohnya, USAID mengupayakan perubahan Undang-undang migas. Inti dari isi undang-undang migas menyatakan bahwa kekayaan alam dan sumber energi vital merupakan milik negara dan dikelola oleh negara yang keuntungan serta hasilnya juga dinikmati oleh rakyat. Namun karena campur tangan USAID, Undang-undang migas ini kemudian berubah, sehingga pihak asing menjadi dominan dalam mengontrol sumber daya migas yang ada di Indonesia. Perusahaan perusahaan energi milik Amerika Serikat lah yang kemudian mengekskspansi sumber kekayaan migas yang ada di Indonesia.

Kerjasama antara Indonesia dengan pihak asing dimulai dari masa pemerintahan Orde Baru, yaitu saat Presiden Soeharto menjabat. Kala itu IMF berusaha membuat Indonesia untuk bekerja sama demi memperbaiki kestabilan ekonomi. Dengan perjanjian itu Presiden Soeharto menghapus undang-undang nasionalisasi perusahaan asing. serta memperbaharui undang-undang investasi. Menariknya setelah adanya perubahan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, perusahaan asing Amerika Serikat memulai ekspansinya kepada Indonesia. Perusahaan asing ini didominasi oleh perusahaan tambang

dan energi guna mengeksplor sumber daya alam Indonesia demi meraup kepentingan untuk perusahaan asing tersebut. Kemudian pada tahun 2009 tercatat 3 perusahaan minyak Amerika Serikat menguasai 52 persen pengelolaan minyak di Indonesia<sup>8</sup>. Kemudian di susul dengan beberapa perusahaan di sektor lain selain minyak, seperti pertanian, peternakan, perhotelan serta di bidang kesehatan seperti farmasi.

Selain itu bukti ekspansi Amerika Serikat kepada Indonesia dapat dilihat melalui pasar modal, dimana jika dikalkulasikan, jumlah investasi asing terbanyak dimiliki oleh Amerika Serikat dibanding dengan negara lainnya. Sementara menurut survey data dari Biro Analisa Ekonomi AS (BEA) pada tahun 2008, jumlah aset dari 165 perusahaan asing mencapai angka US\$54 miliar. Jumlah aset tersebut melebihi aset yang dimiliki oleh pemerintah yang pada tahun yang sama berjumlah Rp 2,070 triliun<sup>9</sup>.

Saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pengaruh USAID terus mengekspansi berbagai kebijakan ekonomi yang cenderung mengikuti kepentingan AS. Sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen program ekonomi milik USAID yang merincikan tentang program “Strategic Plan for Indonesia” pada tahun 2004-2008 didalamnya dijelaskan bahwa USAID bersama Bank Dunia sibuk mencanangkan program privatisasi di Indonesia<sup>10</sup>, dan Economic Growth Assistance Program. Melalui program ekonomi milik USAID ini telah dijelaskan langkah-langkah serta pedoman yang harus diambil dalam privatisasi di Indonesia. Pertama memastikan komitmen privatisasi itu sendiri. Kedua, merevisi serta mempebaharui undang-undang yang mempersulit privatisasi. Ketiga, menciptakan istitusi dan organisasi yang menjembatani menuju arah privatisasi. Keempat, menghindari kekosongan kebijakan privatisasi yang dapat mengakibatkan privatisasi menjadi tidak berjalan dengan semestinya.

---

<sup>8</sup> “Investasi Pembangunan USAID di Indonesia”, <http://www.usaid.gov>, 6 Juni 2014

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> “Dampak Privatisasi di Indonesia”, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), 10 Agustus 2014

Contoh kasus yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selain perubahan undang-undang migas adalah privatisasi perusahaan air. Dimana sebenarnya Air sebagai sumber energi yang tidak terbatas tidak dapat dikomersilkan oleh pihak asing. Namun sekarang kenyataannya perusahaan air asing ikut berperan dalam menyediakan layanan air bagi masyarakat. Selain itu Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan Water Fund Indonesia (WFI) milik Belanda, dimana WFI merupakan yayasan yang dibentuk oleh Aquanet yang merupakan perusahaan swasta milik lima perusahaan air minum Belanda. WFI kemudian membentuk perusahaan swasta lokal di Indonesia dengan nama PT. Karta Tirta Riau. Perusahaan ini 51 % saham mayoritasnya dipegang oleh WFI tersebut.<sup>11</sup>. Selain itu, jumlah badan usaha milik negara yang di privatisasi oleh asing semakin meningkat.

Pada masa pemerintahan SBY kebijakan luar negeri juga sangat dipengaruhi oleh Parlemen, pada wilayah publik, dan lain sebagainya. Di Bidang politik luar negeri, telah terjadi perubahan-perubahan mendasar, yang berpengaruh langsung pada sistem pengambilan keputusan, kebijakan, dan implementasi. Ditambah dengan adanya Undang-undang no 37 yang mengatur hubungan luar negeri, praktis merubah struktur politik luar negeri Indonesia, termasuk struktur pengambilan keputusan, pertanggungjawaban dan pembiayaan politik luar negeri Indonesia. Hal ini berbeda di masa Orde Baru, struktur pengambilan politik luar negeri didominasi oleh kelompok elit, yaitu Presiden<sup>12</sup>. Melalui komisi I yang membidangi masalah luar negeri secara aktif berpeluang dan berkelanjutan melakukan pengawasan (hak kontrol) dan penentu anggaran (hak budget ) terhadap proses penyusunan, kebijakan dan implementasi luar negeri. Hal ini lah yang mendasari USAID mampu mempengaruhi

---

<sup>11</sup> :Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia dalam Penyediaan Air Minum”, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), 20 September 2014

<sup>12</sup> “Borjuasi Ekonomi Indonesia”, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), 19 september 2014

beberapa kebijakan ekonomi di Indonesia, yang masuk dengan mengirimkan tangan kanannya melalui DPR tersebut.

Kemudian ekspansi asing yang mempengaruhi kebijakan dalam pembangunan ekonomi era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah kenaikan harga bahan bakar minyak serta penyaluran dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Sebenarnya terlihat jika BLT ini terkesan pro rakyat, namun hal yang sebenarnya adalah, bahwa pihak asing sengaja mengintervensi kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dengan memotong subsidi energi pemerintah Indonesia.

Dengan dibentuknya program privatisasi dalam dokumen kerja USAID ini, merupakan salah satu bukti ekspansi dan dominasi Amerika Serikat melalui USAID dengan berlindung dibawah tudung bantuan laur negeri yang diberikannya. Privatisasi ini tentunya menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia, karena cenderung menguntungkan pihak asing, yang dalam bahasan ini merupakan Amerika Serikat. Privatisasi ini merupakan pemindahan aset-aset milik negara kepada asing. Yang dibungkus dengan makna yang lebih cantik yaitu, membuka kesempatan kepada asing dan masyarakat untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi negara.

Jika demikian tentunya kita dapat berfikir bahwa sebenarnya kehadiran USAID dan bantuan asing yang diberikannya kepada Indonesia, justru menciptakan dominasi asing yang besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga memunculkan keterkaitan ekonomi dengan Amerika Serikat dalam jangka waktu yang panjang. Maka muncul pertanyaan besar di benak kita semua, apakah dengan ini pembangunan ekonomi di Indonesia dapat terus berjalan dan dikembangkan dengan baik. Sementara ekspansi dan eksploitasi asing terus mengakar melalui tangan-tangan asing yang berkedok sebagai bantuan asing.



Dari latar belakang di atas penulis ingin menulis lebih jauh topik ini dengan judul *“Pengaruh bantuan USAID Dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”*.

## **B. Pokok Permasalahan**

Dengan melihat latar belakang permasalahan tersebut maka dapat di rumuskan suatu pokok permasalahan yaitu: *“Bagaimana bantuan USAID Mempengaruhi Kebijakan Ekonomi Di Indonesia Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?”*

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Penulis ingin memaparkan mengenai bantuan luar negeri apa saja yang diberikan oleh USAID kepada Indonesia
2. Penulis ingin menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri kepada Indonesia
3. Terakhir, Penulis ingin menganalisa mengenai motif dan kepentingan nasional dari Pemerintah Amerika Serikat dalam pemberian bantuan luar negeri terhadap Indonesia.

## **D. Kerangka Teori**

Dalam upaya menjawab pokok permasalahan dan menarik hipotesa maka penulis menggunakan pendekatan melalui pengertian dari Bantuan luar negeri dan Teori Dependensia.

### ***Bantuan luar negeri***

Dalam membahas bantuan luar negeri, pengertian bantuan luar negeri diartikan oleh sejumlah pakar. Dalam arti sempit, bantuan luar negeri diartikan oleh Robert Gilpin dalam bukunya <sup>13</sup>“The Political Economy of International Relations” yakni bantuan luar negeri diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju atau kaya kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin.

Sedangkan dalam arti luas, K.J. Holsti dalam bukunya “International Politics : Framework of Analysis” mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima<sup>14</sup>. 4 tipe utama bantuan luar negeri :

1. Technical assistance / bantuan teknis
2. Grants / hibah, dan program impor komoditi
3. Pinjaman pembangunan
4. Bantuan kemanusiaan yang sifatnya darurat (Emergency Humanitarian Assistance)

Menurut Alan Rix dalam bukunya *Japan’s Foreign Aid Challenge: Policy Reform and Aid Leadership*, pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri adalah tidak terlepas juga dari

---

<sup>13</sup> Dikutip dari Gilpin, Robert., *The Political Economy of International Relation* “ Pengertian bantuan luar negeri”, [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id), tanggal 2 Juli 2014

<sup>14</sup> Holsti, K.J., *Politik Internasional : Kerangka Analisa*, 1995. Hal 180

motivasi para pemberi bantuan luar negeri (negara donor)<sup>15</sup>. Terdapat 4 motivasi negara donor, yaitu :

1. Motif kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi
2. Motif politik, yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image negara donor. Peraihian pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri donor.
3. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki sisi ekonomi.
4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor.

Dalam membahas mengenai motif dan kepentingan bagi negara donor kepada negara penerima dapat kita simpulkan berdasarkan beberapa point di atas. Dari motif maupun kepentingan negara donor yang berkaitan langsung dengan pemberian bantuan luar negeri USAID terhadap Indonesia merupakan sebuah motif ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara Amerika. Dimana USAID dalam proses pemberian bantuan untuk Indonesia disesuaikan dengan tujuan dari Program USAID dalam “Economic Growth Assistance Program” yakni motif ekonomi. Program ini diaplikasikan demi memperbaiki kondisi ekonomi dan mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Fokus dari “Strategic Plan for Indonesia” dan economic growth assistant program adalah perbaikan ekonomi di Indonesia. Dan dilain sisi program ini dimaksudkan untuk memperkuat ikatan keuangan antara negara donor dengan negara penerima bantuan.

---

<sup>15</sup> Dikutip dari Rix, Alan. 1993. Japan;s foreign Aid Challenge Policy Reform and Aid Leadership. London and New York : Routledge, hal 18-19, [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id), tanggal 2 juli 2014

Bantuan luar negeri oleh negara donor dilatarbelakangi oleh sejumlah kepentingan. kepentingan negara donor (dalam hal ini USAID), dijelaskan sebagai faktor pendorong pemberian bantuan luar negeri yang tergantung kepada 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemanusiaan.

Faktor ekonomi melihat kepentingan-kepentingan ekonomi yang mendorong pemberian bantuan luar negeri oleh negara donor kepada negara penerima, dalam hal ini adalah Amerika Serikat kepada Indonesia. Untuk mengukur faktor ini, dapat ditinjau dari kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Fakta di lapangan yang menunjukkan ekspansi asing Amerika Serikat terhadap beberapa perubahan kebijakan ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi motif Amerika Serikat dalam memberikan bantuan asingnya kepada Indonesia. Di satu sisi bantuan luar negeri dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara penerima bantuan, namun di sisi lain, dapat menimbulkan dampak perluasan permintaan barang dan jasa dari negara donor, hal ini terbukti dari tingginya elastisitas permintaan akan impor barang dan jasa dari negara donor<sup>16</sup>.

Faktor Politik melihat alasan-alasan politis dari pemberian bantuan luar negeri, yang diatur dengan melihat keputusan-keputusan maupun pernyataan politik yang dikeluarkan oleh para elite politik Amerika Serikat tentang hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia serta kaitannya dengan bantuan luar negeri USAID kepada Indonesia.

Faktor kemanusiaan melihat alasan-alasan etis dari pemberian bantuan luar negeri. Terhadap sejumlah pemikiran yang berkembang di negara Amerika Serikat yang meyakini pentingnya pemberian bantuan luar negeri oleh negara maju kepada negara berkembang. Tanggung jawab moral negara kaya kepada negara miskin dilandasi premis bahwa interdependensi ekonomi politik internasional berarti memperluas keadilan sosial dari lingkup nasional dan internasional. Hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi

---

<sup>16</sup> SUBANDI, "*Ekonomi Pembangunan*", Penerbit ALFA BETA, Bandung 2014, HAL 192

sebagian besar rakyatnya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengangkat mereka dari jurang kemiskinan.

Dari ketiga faktor di atas, maka terdapat banyak alasan maupun pertimbangan baik dari negara donor maupun negara penerima dalam melakukan suatu hubungan kerjasama dalam pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri. Bantuan asing yang diberikan oleh USAID kepada Indonesia didasari pada kepentingan negara donor yakni kepentingan Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Program Bantuan luar negeri biasanya saling menguntungkan kedua pihak. Pihak penerima memperoleh pinjaman dana, perlengkapan, pengetahuan yang diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan keamanan militer. Sedangkan pihak pemberi atau donor selalu mengharapkan keuntungan ekonomi dan politik baik langsung maupun jangka panjang.

Bantuan luar negeri di Indonesia telah berperan penting dalam menutup defisit anggaran dan defisit transaksi. Boleh dikatakan dengan injeksi bantuan ini Indonesia telah mempercepat laju pertumbuhan ekonominya. Namun ketika bantuan luar negeri ini tidak diperhitungkan dan dikelola dengan baik hal ini dapat menjadi bom waktu bagi Indonesia. Instrumen bantuan luar negeri ini lebih mengandalkan kapabilitas dalam bentuk modal, sumber daya, serta kemampuan manajerial.

## **Teori Dependensia**

Secara historis, teori Dependensia lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi dalam membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Pencetus dasar teori tersebut adalah Paul Baran yang menghasilkan deklarasi ekonomi Amerika Latin dengan konsep model dasar tesis alternatif mengenai keterbelakangan ekonomi

yang terjadi di Negara-negara dunia ketiga<sup>17</sup>. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

Paradigma inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara Dunia Ketiga tidak berjalan dan tidak berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Keterbelakangan jilid dua di negara Dunia Ketiga ini disebabkan oleh ketergantungan yang diciptakan oleh campur tangan negara maju kepada negara Dunia Ketiga.

Jika pembangunan ingin berhasil, maka ketergantungan ini harus diputus dan biarkan negara Dunia Ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri<sup>18</sup>.

Proses keterbelakangan yang melanda negara-negara baru, menurut Furtado (1972) meliputi tiga tahapan historis yang terdiri dari:

1. *Tahap keuntungan-keuntungan komparatif*. Selama periode se usai revolusi industry, ketika sistem divisi tenaga kerja internasional diciptakan dan ekonomi dunia distrukturkan, negara-negara industry pada umumnya menspesialisasikan diri pada kegiatan-kegiatan yang ditandai dengan kemajuan teknik yang menyebar.

---

<sup>17</sup> Kuncoro, Mudrajad., "Ekonomi Pembangunan", Penerbit Upp Amp Ykpn, Yogyakarta 1997, Hal 61

<sup>18</sup> SUBANDI, "Ekonomi Pembangunan", Penerbit ALFA BETA, Bandung 2014, HAL 61

2. *Tahap substitusi impor.* Terbentuknya suatu kelompok sosial kecil dengan keistimewaan (privileges) dikalangan bangsa-bangsa yang terbelakang menimbulkan suatu keharusan untuk mengimpor sejumlah barang-barang tertentu guna memenuhi pola konsumsi yang telah diadopsi kelompok ini dalam meniru bangsa yang kaya.
3. *Tahap berkembangnya perusahaan multi-nasional (PMN).* Timbulnya PMN telah menjadi suatu fenomena terpenting dalam tatanan ekonomi internasional, karena transaksi internal yang dilakukan oleh PMN telah mengambil alih operasi pasar yang ada selama ini.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dari instrumen bantuan luar negeri dan motivasinya. Argumen diatas menyatakan bahwa bantuan luar negeri diberikan karena didorong oleh motivasi ekonomi negara pendonor. Keuntungan-keuntungan terbesar yang akan dibuahnya akan dipetik oleh pihak negara-negara atau lembaga donor. Meningkatnya arus pemberian pinjaman sebagai ganti dari hibah (pinjaman berbunga yang diberikan dewasa ini meliputi lebih dari 80 persen dari total bantuan luar negeri yang diterima oleh negara-negara dunia ketiga, sedangkan dalam periode-periode sebelumnya kurang dari 40 persen) serta usaha-usaha untuk mengaitkan bantuan luar negeri dengan keharusan membeli produk-produk dari negara-negara donor telah menjerumuskan banyak negara-negara dunia ketiga ke dalam beban utang luar negeri yang sangat besar.<sup>19</sup>

Beberapa perubahan Undang-undang mengenai penanaman modal asing, privatisasi serta pengelolaan di sektor migas menunjukkan campur tangan asing dalam memainkan pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Karena secara tidak langsung pihak asing lah yang lebih banyak meraup keuntungan dan hasil ekspansi ekonomi di Indonesia. Bantuan luar negeri yang mereka berikan menjadi instrumen dan pelancar tujuan mereka dalam mengekspansi

---

<sup>19</sup> Michael P Todaro *"Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga edisi ke tujuh"* Penerbit : Erlangga, Jakarta : 2000

kebijakan perekonomian di Indonesia. Hal ini kemudian melahirkan sebuah ketergantungan ekonomi terhadap negara pendonor. Masuknya campur tangan asing ke dalam lingkaran ekonomi Indonesia, baik melalui modal maupun multinational corporation milik mereka yang berimbas kepada besarnya keuntungan yang diperoleh pihak asing dalam hal ini adalah Amerika Serikat dibanding Indonesia, serta persaingan yang tidak sehat terhadap hasil produk dalam negeri karena dominasi Multinational corporation yang merajalela.

Fleksibilitas Amerika Serikat dalam menguasai serta mengelola sektor-sektor energi penting milik Indonesia akibat perubahan Undang-undang migas yang dipengaruhi oleh organisasi miliknya yaitu USAID. Hal ini tentu menyebabkan perlambatan pembangunan ekonomi di Indonesia, dan tentu saja ketergantungan terhadap Amerika Serikat untuk jangka waktu yang panjang.

Interaksi yang terjadi antara negara maju dengan negara miskin lebih bersifat eksploitasi negara maju terhadap negara miskin<sup>20</sup>. Dominasi perekonomian dunia oleh negara-negara maju dan rekayasa eksploitasi yang dilakukan oleh mereka, justru menjadikan negara-negara pinggiran ini semakin tergantung kepada negara-negara pusat.

Dalam buku Michael P Todaro ini penulis mengutip pernyataan salah seorang mantan pejabat urusan bantuan luar negeri pemerintah federal Amerika Serikat :

“Salah paham yang paling besar mengenai program bantuan luar negeri adalah anggapan bahwa kita hanya mengirimkan uang begitu saja ke luar negeri. Kenyataannya tentu saja tidaklah demikian. Pengiriman bantuan luar negeri resmi tersebut biasanya terwujud berupa penjualan peralatan-peralatan, bahan baku, produk makanan, dan tenaga-tenaga ahli Amerika Serikat secara kredit yang kesemuanya diberikan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan tertentu yang telah kita teliti dan setuju. Bahkan 93 persen dari dana bantuan resmi pemerintah federal Amerika Serikat yang disalurkan melalui AID

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 63



(Agency for International Development) tersebut dibelanjakan secara langsung di Amerika Serikat. Pada tahun 1967 saja terdapat sekitar 4000 perusahaan Amerika Serikat di 50 negara bagian Amerika Serikat yang telah menerima hasil penjualan sebesar US\$ 1,3 miliar dari dana-dana bantuan yang disediakan untuk negara lain agar mereka bisa membeli barang-barang modal bantuan Amerika, dan itu merupakan bagian tetap dari program “bantuan” luar negeri”<sup>21</sup>.

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa sebenarnya pemberian bantuan luar negeri itu sendiri menciptakan keterkaitan kepentingan ekonomi negara pendonor dengan negara penerima donor. Tentunya hal ini relevan dengan teori dependensia yang digunakan untuk menganalisa skripsi ini.

## **E. Hipotesa**

Berdasarkan analisis rumusan masalah dengan kerangka teori yang digunakan, maka sementara ini penulis dapat menarik kesimpulan sementara bahwa :

Bantuan yang diberikan oleh Amerika melalui USAID telah mempengaruhi beberapa perubahan kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Berbagai macam bantuan asing yang diberikan USAID seperti aliran dana, tenaga-tenaga ahli, maupun proyek-proyek pembangunan sebenarnya adalah bahwa Amerika Serikat telah terlebih dahulu melihat kepentingan nasional yang diharapkannya. Motif kepentingan ekonomi yang dimiliki USAID dibalik instrumen bantuan asing yang diberikannya menjadi dasar dari beberapa perubahan kebijakan ekonomi di Indonesia dan diharapkan menjadi timbal balik keuntungan bagi Amerika Serikat.

---

<sup>21</sup> Todaro, P Michael, Opcit, hal 187

## **F. Metodologi Penelitian**

Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder. Data Primer didapatkan dari laporan resmi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku buku ilmiah dan artikel-artikel dalam buku, jurnal, dan artikel-artikel dalam buku, jurnal, dan surat kabar.

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Penulis juga memperoleh data yang terpaparkan dari internet yang merupakan isi hasil wawancara dari narasumber terpercaya yaitu Direktur Politik dan Komunikasi yang turut terjun langsung dalam proses pelaksanaan program bantuan luar negeri USAID kepada Indonesia. Selain itu, data-data yang ada juga didapatkan melalui penelusuran sumber-sumber para ahli dan tokoh politik yang mereka paparkan melalui penulisan buku maupun artikel ataupun jurnal online yang tersedia di Internet.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis membaginya berdasarkan sistematika berikut ini :

**BAB I**, Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, sistem penulisan.

**BAB II**, Membahas secara umum mengenai USAID (United States Agency for International Development) Kiprah USAID di Indonesia dan hubungan kerjasama antara USAID Indonesia serta membahas mengenai program-program bantuan luar negeri yang diberikan USAID

kepada Indonesia dalam agenda economic assistance growth program. Serta mengenai pelaksanaan program bantuan luar negeri tersebut dan memaparkan jenis bantuan yang diberikan oleh USAID.

**BAB III,** Membahas mengenai USAID sebagai instrument hegemoni Amerika Serikat di Indonesia serta motivasi sikap dan alasan apa yang mendasari Pemerintah Amerika Serikat dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia.

**BAB IV,** Membahas implikasi bantuan yang diberikan oleh USAID kepada Indonesia, serta ketergantungan Indonesia dengan Amerika Serikat.

**BAB V,** Merupakan kesimpulan dari penjabaran dan analisa yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat oleh penulis.